

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh struktur kepemilikan terhadap penghindaran pajak dengan keberagaman gender dewan direksi sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024. Struktur kepemilikan dalam penelitian ini diproksikan melalui kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan asing. Penghindaran pajak diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), sedangkan keberagaman gender dewan direksi diukur menggunakan *Blau Index*. Penelitian ini didasarkan pada Teori Keagenan dan *Upper Echelons Theory* sebagai landasan konseptual dalam menjelaskan hubungan antar variabel. Populasi penelitian terdiri atas perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode pengamatan. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling sehingga diperoleh 167 observasi perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan *Random Effects Model* (REM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, yang berarti semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin rendah kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Kepemilikan manajerial dan kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya, keberagaman gender dewan direksi terbukti memperkuat pengaruh negatif kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak, namun tidak terbukti memoderasi pengaruh kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas mekanisme tata kelola perusahaan dalam menekan penghindaran pajak tidak hanya ditentukan oleh struktur kepemilikan, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan internal perusahaan. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur tata kelola perusahaan dan perpajakan, khususnya pada konteks perusahaan sektor pertambangan di negara berkembang.

Kata Kunci: struktur kepemilikan, penghindaran pajak, kepemilikan institusional, keberagaman gender, dewan direksi, sektor pertambangan.